

“BLUE AND ECONOMY POLICY” AND THEIR IMPACT TO INDONESIAN COMMUNITY WELFARE

Siti Nurhayati

Guru Besar Fakultas Ekonomi UNIKAL Pekalongan

Email: nurhayati_ms99@yahoo.co.id

ABSTRACT

The main goals of Indonesia development policy is an Indonesian community welfare through some strategies that applied at all development fields. Recently, blue economy concept was developed beside green economy. It concepts build after Rio+20 meeting at June 2012 ago in Rio de Janeiro, Brazil. Those meeting has result a document that call “the future we need” with stressing on green economy.

Susilo Bambang Yudhoyono, the president of Indonesia talk about his speech “moving towards sustainability: together we must create the future we want”. So far, United Nations Environment Programme (UNEP) take a theme “Green Economy : Does it Include You ?” at “World Environment Day” ceremony, June 5th, 2012. The Blue and Green Economy (BGE) comes as an exact and sustainable solution for environment maintain and focused on three factors : ecology, social, and economy.

In Indonesia, the BGE applied together for development policy, that have much impact to economic activities as a multiplier effect. The more economic activities done, the more income receipt by communities. It is a characteristic of welfare. So, by implement the BGE concept to Indonesian development policy, the impact of community welfare was realized.

Key words : blue and green economy (BGE), community welfare, Rio+20 meeting

PENDAHULUAN

Sebelum Indonesia berencana melaksanakan kebijakan ekonomi biru (*blue economy*), sebetulnya konsep ini sudah diterapkan di beberapa negara seperti Korea Selatan, China, dan Kanada. Penerapan konsep *blue economy* di Indonesia dimulai sejak presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato pada KTT Rio+20 di Riocentro, Rio de Janeiro, Brasil yang dilaksanakan selama sembilan hari mulai 13 – 22 Juni 2012. Ribuan acara diadakan menjelang dan selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tentang

Pembangunan Berkelanjutan, di Rio de Janeiro, Brazil, yang selanjutnya lebih dikenal dengan KTT Rio+20, yang merupakan konferensi PBB terbesar yang pernah diselenggarakan dengan jumlah peserta sebanyak 29.373 orang yang terdiri dari para pemimpin Pemerintah, bisnis dan organisasi kemasyarakatan, pejabat PBB, akademisi, wartawan dan masyarakat umum. Peserta sebanyak 29.373 orang tersebut terdiri atas delegasi sekitar 12.000 orang, LSM dan Kelompok Utama 10.047 orang dan Media 3.989 orang.

KTT Pembangunan Berkelanjutan atau KTT Rio+20 diikuti oleh 191 negara yang dihadiri 105 Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dan 487

menteri. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi oleh sejumlah Menteri. Kehadiran Presiden RI dan sejumlah Menteri menunjukkan keseriusan Indonesia untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan, termasuk kesiapan peran kepemimpinan Indonesia dalam agenda global (Kementerian lingkungan Hidup, 6 juli 2012 – <http://www.menlh.go.id>). Diskusi yang dilakukan oleh para kepala Negara pada KTT Rio + 20 ini menghasilkan dokumen “the future we need” dengan menekankan *green economy*. Pada kesempatan di Riocentro convention center itu presiden SBY menyampaikan pidato berjudul “moving towards sustainability: together we must create the future we want”.

Alasan Indonesia untuk menerapkan konsep *blue economy* dilandasi oleh kenyataan kondisi geografis Indonesia adalah Negara kepulauan yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia (setelah Kanada), sehingga perlu dipikirkan bagaimana caranya untuk melestarikan sumber daya laut karena pelestarian sumber daya laut ini akan berdampak pada cadangan sumber pangan masyarakat yang bisa diandalkan. Sumber daya laut Indonesia menjadi tumpuan banyak orang yang memiliki mata pencaharian di bidang perikanan dan kelautan seperti nelayan, para pengolah ikan, pengelola wisata bahari beserta usaha-usaha turunannya seperti biro perjalanan, penginapan, pedagang cinderamata, dan sebagainya.

Namun demikian perlu diketahui bahwa sebelum ide penerapan konsep *blue economy* ini, sebelumnya sudah diterapkan konsep *green economy* dalam perencanaan pembangunan Indonesia; bahkan *green economy* masih dijadikan tema pada peringatan hari lingkungan hidup tahun 2012 ini. Oleh karena ke dua konsep tersebut masih sejalan dengan kebijakan pembangunan Indonesia yang berbasis pada kelestarian lingkungan, sumber daya alam, dan pertumbuhan ekonomi, maka tidak ada salahnya jika dalam perencanaan pembangunan Indonesia konsep “*Blue and Green Economy* (BGE)” diterapkan secara bersamaan dan saling melengkapi. Melalui kebijakan pelestarian sumber daya laut sebagai bagian dari perencanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia akan memberikan dampak positif yang sangat luas bagi tumbuh kembangnya usaha-usaha yang menggantungkan usahanya pada sumber daya laut dan segala produk turunan dan sampingannya.

Selanjutnya, yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia adalah keseriusan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan *blue* dan *green economy* ini, mengingat konsep perencanaan pembangunan Indonesia dengan menerapkan kebijakan BGE dapat berdampak pada kelestarian lingkungan, ketahanan pangan, dan pendapatan masyarakat.

METODE PENULISAN

B.1. Pengertian

Pada tanggal 5 Juni 2012 yang lalu kita memperingati hari lingkungan hidup sedunia (*World Environment Day/WED*). Program Lingkungan PBB (*United Nations Environment Programme / UNEP*) mengambil tema “*Green Economy : Does it Include You ?*”. Dalam konteks Indonesia, tema yang diambil pada peringatan hari lingkungan hidup di Indonesia tersebut adalah “Ekonomi Hijau (*green economy*) : Ubah perilaku, tingkatkan kualitas lingkungan”. Jelas dari tema tersebut kita dihimbau untuk merubah perilaku yang selalu mengambil setiap peluang untuk mencari informasi, belajar, dan bertindak demi mengelola dan melindungi lingkungan hidup, sehingga kualitas lingkungan menjadi lebih baik dan akibatnya kualitas hidup masyarakat juga semakin baik. Jika pada bulan Juni yang lalu kita masih berbicara perencanaan pembangunan Indonesia yang berorientasi pada “*green economy*”, lalu apa kaitannya dengan “*blue Economy*”. Konsep “*blue economy*” menjadi satu hal yang akan mendukung jalannya konsep “*green economy*” yang selama ini menjadi konsep dalam perencanaan pembangunan Indonesia.

Pengertian ekonomi hijau dalam kalimat sederhana dapat diartikan sebagai perekonomian yang rendah karbon (tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan), hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial (UNEP, dalam Alamendah's blog, 3 Juni 2012). Sedangkan konsep *blue economy* pertama kali dilontarkan oleh Prof. Gunter Pauli dalam bukunya yang berjudul “*The Blue Economy, 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs*”, yang menggambarkan potensi manfaat teorinya bagi perlindungan lingkungan hidup komunitas dunia, pelestarian sumber daya alam, inisiatif pengurangan biaya industri dengan pengalihan pada konsumsi energi hijau, bersih, hasil daur ulang atau terbarukan. Dalam bukunya tersebut, Pauli (2006) menyebutkan bahwa “*Blue Economy*” is a collection of

innovations contributing towards the creation of a global consciousness rooted in the search for practical solutions based on sustainable natural systems".

Istilah "*blue economy*" merupakan sebuah paradigma (konsep) baru yang bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dari sektor kelautan dan perikanan, sekaligus menjamin kelestarian sumberdaya serta lingkungan pesisir dan lautan (Menteri Kelautan dan Perikanan Syarif C. Sutardjo, 2012). *Blue economy* merupakan model pendekatan pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan, namun merupakan suatu lompatan besar dalam pembangunan, dengan meninggalkan praktek ekonomi yang mementingkan keuntungan jangka pendek serta menggerakkan perekonomian yang rendah karbon (*low carbon economy*). "Model pendekatan *blue economy* diharapkan mampu menjawab ketergantungan antara ekonomi dan ekosistem serta dampak negatif akibat aktivitas ekonomi termasuk perubahan iklim dan pemanasan global".

Blue economy sebagai konsep baru pembangunan kelautan dan perikanan akan diarahkan pada pembangunan ekonomi yang seimbang antara pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dengan upaya pengelolaan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan.



Panorama alam dengan perpaduan warna biru dan hijau

Kebijakan *blue economy* maupun *green economy* merupakan paradigm dimana warna dijadikan cerminan kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara; oleh karena itu tidaklah salah jika warna

hijau dan biru disematkan pada Indonesia. Tentu tidak berlebihan mengingat Indonesia memiliki alam yang hijau menyejukkan dan laut yang biru membahana sebagaimana diilustrasikan dalam gambar di samping ini.

Pelaksanaan konsep BGE bagi Indonesia dapat memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat suatu negara dapat diukur melalui beberapa aspek seperti : pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, fertilitas dan keluarga berencana, maupun tingkat konsumsi atau pengeluaran rumah tangga (Hendra, Roy, 2010). Sementara "*United Nations Development Programme (UNDP)*" menetapkan kriteria kesejahteraan dengan indikator *Human Development Index (HDI)* yang meliputi 3 komponen pembangunan manusia yang dianggap paling dasar, yaitu : (1) Usia hidup (*longevity*), (2) Pengetahuan (*knowledge*), dan (3) Standar hidup layak (*decent living*). Ke tiga komponen HDI tersebut merupakan bagian dari hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi rumah tangga, terutama tingkat daya belinya.

Pendekatan lain untuk mengukur kesejahteraan masyarakat di Indonesia adalah dengan menggunakan kriteria yang digunakan untuk menentukan keluarga atau rumah tangga miskin yang dikeluarkan oleh BPS. Jika BPS menetapkan 14 kriteria keluarga miskin, maka berdasar 14 kriteria tersebut dapat digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan. Berikut ini adalah kriteria untuk mengatakan suatu rumah tangga atau keluarga dikatakan sejahtera jika:

1. luas bangunan tempat tinggal minimal 8 M² per orang
2. jenis lantai tempat tinggal adalah ubin
3. jenis dinding rumah adalah tembok sudah diplesir
4. memiliki fasilitas MCK
5. sumber penerangan rumah tangga menggunakan listrik
6. sumber air minum adalah sumur terlindung atau PAM
7. bahan bakar untuk memasak adalah gas atau listrik
8. mengkonsumsi daging/susu/ayam minimal 2 kali dalam satu minggu
9. membeli pakaian minimal 2 stel per tahun
10. makan minimal 3 kali sehari
11. bila ada anggota keluarga yang sakit sanggup memeriksakan ke Puskesmas/dokter

12. penghasilan kepala keluarga utama diatas Rp 600.000,- per bulan
13. pendidikan kepala keluarga minimal tamat SD
14. memiliki tabungan atau barang berharga senilai minimal Rp 500.000,-

B.2. Penerapan *Blue and Green Economy* (BGE) di Indonesia

Menurut Jusuf (2012), ekonomi biru dapat dilihat sebagai tindakan yang bertumpu pada pengembangan ekonomi rakyat secara komprehensif guna mencapai pembangunan nasional secara keseluruhan. Pendekatan pembangunan berbasis ekonomi biru akan bersinergi dengan pelaksanaan *triple track strategy*, yaitu program *pro-poor* (pengentasan kemiskinan), *pro-growth* (pertumbuhan), *pro-job* (penyerapan tenaga kerja) dan *pro-environmentment* (melestarikan lingkungan).

Ketika daya dukung (sumber daya) alam dan daya tampung lingkungan sudah tidak seimbang dan tidak kuat lagi dalam menampung dan memfasilitasi kegiatan penduduk (kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk), maka otomatis kehidupan kita dan kehidupan generasi mendatang akan terancam karena kesalahan kita akibat kerusakan lingkungan. Agar tidak terjadi hal itu, memang dibutuhkan pemahaman, kesadaran, dan pembelajaran (pemberdayaan) kepada sesama akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Dan semoga program ekonomi hijau ini, juga bisa jadi model dan pedoman dalam setiap langkah kegiatan manusia di Bumi ini (Andi M., dalam Alamendah's Blog, 2012). Inilah pentingnya perubahan paradigma dan perilaku manusia untuk selalu mengambil setiap kesempatan dalam mencari informasi, belajar dan melakukan tindakan demi melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Dengan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Prinsip-prinsip yang terkandung di dalam ekonomi biru dapat menjadi kunci emas di dalam perencanaan pembangunan nasional. Langkah-langkah konkret dari penerapan "*blue economy*" ini terbagi menjadi tiga, yaitu : "Pertama adalah soal pemahaman yang lebih jelas tentang nilai dari ekosistem laut.

Kedua, dengan lebih efektif mengaitkan ekosistem laut dengan ketahanan pangan, ini terkait dengan kesinambungan bahan pangan dengan strategi ekonomi serta sosial pembangunan," sementara pendekatan ketiga adalah dengan transisi ekonomi

dalam potensi ekonomi menyangkut pasar, industri, dan komunitas terhadap pola pembangunan yang lebih berkeadilan.



Kegiatan nelayan di pantai nan elok

Prinsip ekonomi biru dinilai tepat dalam membantu dunia untuk menghadapi tantangan perubahan iklim, ekosistem laut yang kian rentan terhadap dampak perubahan iklim dan pengasaman laut. Dalam konsep *blue economy*, Kementerian Kelautan dan Perikanan, akan berfokus pada tiga factor, yaitu, ekologi, sosial, dan ekonomi,

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengatakan, prinsip ekonomi biru tidak bertentangan dengan konsep ekonomi hijau yang kerap didengungkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Konsepsi ekonomi biru dapat menjembatani ekonomi hijau yang selama ini diterapkan dalam perencanaan pembangunan di Indonesia," kata Sharif Cicip Sutardjo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta. Menurut Sharif, kedua hal tersebut tidaklah bertentangan tetapi saling melengkapi karena ekonomi biru merupakan bagian integral dari ekonomi hijau. Ia memaparkan, prinsip-prinsip yang terkandung di dalam ekonomi biru dapat memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi demi mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. (Antara, 2012).

Indonesia yang memiliki ciri sebagai negara agraris dan maritim, menyimpan potensi yang sangat besar bagi nusantara, termasuk di bidang ekonomi. Lumbung devisa negara kita sampai saat ini pun masih berada di alam. Mulai dari sektor pertanian, kelautan, perikanan, hingga sektor pariwisata. Apa lagi saat ini konsep *Blue & Green Economy* (BGE) tengah marak digalakkan seantero dunia karena permasalahan lingkungan yang mendesak dan telah mengancam kelangsungan hidup manusia.

Pada dasarnya BGE merupakan sebuah konsep ekonomi baru yang menjadi harapan atas dua masalah besar yang sedang mendera dunia, yakni permasalahan lingkungan dan krisis energi. Saat ini banyak negara yang mengidap dua “penyakit” tersebut. Dan tidak sedikit biaya yang mesti melayang untuk mengatasinya. Apalagi kedua masalah itu bagaikan penyakit komplikasi yang penyelesaiannya bagaikan buah simalakama. Menciptakan energi besar untuk mengatasi krisis energi, misalnya dengan energi nuklir. Namun di sisi lain praktek tersebut akan memperparah masalah lingkungan. Pun sebaliknya, melestarikan lingkungan dengan mengeliminasi praktek-praktek eksploitasi akan memperparah krisis energi bahkan akan menyebabkan krisis ekonomi. Bukan cerita baru jika sumber kekayaan dan energi dunia saat ini masih mengandalkan praktek yang bersifat eksploitatif.

Di tengah kerumitan inilah, konsep BGE hadir sebagai solusi yang tepat dan berkelanjutan (*exact and sustainable solution*) untuk menyelesaikan kedua permasalahan tersebut tanpa dihantui buah simalakama. Hal tersebut dikarenakan konsep BGE sangat berbeda dengan ekonomi eksploitatif.

Di saat ekonomi eksplotatif hanya bertujuan untuk mencapai profit saja. Konsep BGE justru hadir sebagai konsep ekonomi yang ideal dan berkelanjutan berbasis manivestasi alam yang lebih baik, baik daratan (*green*) maupun lautan (*blue*). Konsep BGE juga didasari atas tiga pilar utama yakni *profit*, *people*, dan *planet*. Jadi dengan BGE, profit akan tetap tercapai baik itu keuntungan secara finansial maupun terciptanya energi baru sebagai tujuan utama, namun tetap mementingkan alam sehingga tidak menambah kerusakan lingkungan justru menyelesaikannya. Jadi tidak mengherankan jika BGE mendatangkan banyak manfaat besar bagi manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*).

Namun BGE merupakan megaprojek jangka panjang yang juga membutuhkan modal yang cukup besar yakni kekayaan alam serta sumber energi terbarukan. Bukan apa-apa, sebab GBE memang hadir untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan dan krisis energi. Mungkin permasalahan modal dalam menerapkan BGE akan menjadi ironi besar bagi banyak negara yang tidak memiliki banyak kekayaan alam atau sumber energi terbarukan, terlebih bagi negara-negara yang masih sangat bergantung terhadap praktek-praktek ekonomi eksploitatif, namun tidak bagi Indonesia.

Sadar atau tidak, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar menjadi ujung tombak penerapan BGE dunia, mengingat besarnya kekayaan alam yang dimiliki negara kita mulai dari Sabang hingga Merauke. Sumber energi terbarukan pun melimpah ruah di negara tercinta kita. Apa saja kekayaan alam dan sumber energi terbarukan di Indonesia

MASALAH DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Dampak Kebijakan *Blue* dan *Green Economy* (BGE) bagi Kesejahteraan Masyarakat

"*Blue and Green Economy* (BGE)" merupakan hal yang penting karena sektor ekonomi kelautan dan perikanan merupakan sumber daya yang berlimpah yang menjanjikan usaha-usaha yang menguntungkan dan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Dengan kata lain pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dapat mengatasi tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Dengan mengembangkan sektor ekonomi kelautan, maka akan tercipta pusat-pusat kemakmuran yang tersebar di seluruh wilayah nusantara. Ini dapat memecahkan permasalahan kronis bangsa berupa ketimpangan pembangunan antarwilayah, '*brain drain*', dan urbanisasi,

Konsep "*sustainability development with equity*" (pembangunan berkelanjutan dengan kesetaraan) menjadi pegangan Indonesia dan menjiwai semua perencanaan pembangunan. "Konsep ini merasuk hati kami, karena kami serius menjaga pembangunan berkelanjutan, memangkas angka kemiskinan, dan mengangkat kesejahteraan seluruh rakyat," (presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Juni 2012). Inti dari pidato yang disampaikan presiden SBY tersebut mengindikasikan bahwa dalam penerapan konsep BGE dalam perencanaan pembangunan Indonesia memiliki tujuan akhir pada peningkatan pendapatan, yang juga berarti kesejahteraan masyarakat meningkat.

Penjelasan di muka mengandung arti bahwa perencanaan pembangunan di Indonesia harus memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan sumber daya hayati secara seimbang agar terjamin keberlangsungannya (*sustainable*), dapat memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia (*community welfare*).

Lebih jauh bisa dijelaskan bahwa kebijakan BGE yang dilaksanakan oleh Indonesia dapat memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tumbuh kembangnya berbagai usaha yang bisa dijalankan masyarakat yang mengandalkan kegiatannya pada sumber daya perikanan dan kelautan (sumber daya hayati) seperti pelaku-pelaku usaha budidaya dan penangkapan ikan, pengolahan ikan, budidaya rumput laut, pembuatan kerajinan berbahan baku kerang, wisata bahari, dan segala usaha yang melekat seperti rumah makan bagi wisatawan, penginapan, dan sebagainya. Kondisi seperti inilah yang diimpikan oleh para penyusun rencana pembangunan di Indonesia, yang memiliki cita-cita mulia untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu marilah kita “ubah perilaku kita, dan tingkatkan kualitas lingkungan” (sebagaimana tema hari lingkungan hidup Indonesia tahun 2012).

KESIMPULAN

Penerapan konsep BGE secara berdampingan dalam perencanaan pembangunan Indonesia membawa dampak positif bagi kelestarian sumber daya perikanan dan kelautan serta lingkungan. Jika tujuan dari kebijakan ekonomi biru (*blue economy*) adalah agar sumber daya laut terpelihara kelestarian/keberlangsungannya, dan kemudian tujuan kebijakan ekonomi hijau (*green economy*) adalah pelestarian lingkungan hidup, maka alangkah lebih indahnya jika kedua kebijakan itu dilaksanakan secara berdampingan, yang satu melengkapi yang lain sehingga menjadi kebijakan ekonomi biru dan hijau (*Blue and Green Economy /BGE*).

Perencanaan pembangunan dengan menerapkan konsep BGE memiliki konsekuensi pada perubahan paradigma perilaku masyarakat untuk lebih cinta lingkungan, lebih cinta sumber daya hayati, dan berusaha untuk menjaga kelestariannya. Dengan demikian cita-cita luhur yang tertuang dalam perencanaan pembangunan Indonesia untuk mensejahterakan masyarakat bisa terlaksana melalui kebijakan BGE ini, mengingat penerapan konsep BGE membawa dampak berantai pada tumbuh-kembangnya usaha-usaha yang menggandalkan kekayaan laut dan lingkungan

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Anhar Rizki 2012. *Indonesia Bertekad Capai Blue Economy*, VIVA News edisi 9 Juni 2012
- Hendra, Roy 2010. *Determinan Kemiskinan*, UI Press.
- Jusuf, Gellwynn (2012). *Ekonomi Biru Menjadi Arah Kebijakan Pembangunan Perikanan* Siaran Pers Tanggal 6 Juni 2012.
- Mula, 2012. *Ekonomi Biru Tidak Bertentangan dengan Ekonomi Hijau*. Antara, 25 Juni 2012
- Pauli, Gunter 2006. *“The Blue Economy, 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs”*. Paradigm Publications
- Sutardjo, Syarif C. 2012. *Ekonomi Biru dan Industrialisasi Kelautan Perikanan*, 15 September 2012
- Sutardjo, Sharif C. 2012. *Ekonomi Biru Tidak Bertentangan dengan Ekonomi Hijau*; Antara, edisi Senin, 25 Juni 2012
- Suhanto, 2011. UMKM: Pilar Fundamental Perekonomian Nasional, Direktorat Dagang Kecil dan Menengah, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
- <http://www.menlh.go.id>. Kementerian lingkungan Hidup, 6 juli 2012
- <http://id.berita.yahoo.com/finance.html>. *Blue economy : perbaiki hubungan manusia dan laut*.
- <http://www.analisadaily.com>. Inisiatif “Ekonomi Biru” RI Vs “Blue Economy Gunter Pauli”, Harian Analisa, edisi Rabu, 22 Februari 2012
- <http://3.bp.blogspot.com> . Imam Hidayat, 2012. *Indonesia: Ujung Tombak Green & Blue Ekonomi Dunia*
- <http://www.dinsos.pemda-diy.go.id> : Kreteria untuk menentukan keluarga/rumah tangga miskin.